

**EVALUASI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN  
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar  
Tahun Anggaran 2003-2007)**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**WINDARTI**  
**B 200 050 121**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan Negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah, bahkan dapat dikaitkan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan Negara, berbagai kebijakan yang telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan otonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di negara kita masih terus dijalankan diberbagai sektor pada hakekatnya bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam GBHN bab 1 yaitu:

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaanya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkedaulatan, sejahtera, maju, dan kokoh kekuatan moral dan etikanya.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dana merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pajak yang berasal dari masyarakat, sektor penerimaan pajak merupakan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam menyelenggarakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah

masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Selain sumber daya manusia, faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan pasal 79 undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan terdiri atas:
  - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat pembayar pajak, jelaslah bahwa secara keseluruhan sebenarnya mekanisme pembangunan itu

merupakan siklus yang senantiasa berputar antara masyarakat yang membayar pajak, dihimpun oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan dan dikembalikan kepada masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana sehingga laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dan pada akhirnya masyarakat akan lebih mampu meningkatkan kewajibanya untuk membayar pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas pendapatan Daerah berpegang pada Perda Daerah masing-masing. Sebelum tahun 2003 – 2007 menggunakan Perda Kabupaten Dati II Karanganyar No 33 tahun 1965 tentang Pajak Pembangunan I yang kemudian Pajak Pembangunan I diganti dengan Pajak Hotel dan Restoran sehingga tahun anggaran 2003 – 2007 menggunakan Perda Kabupaten Dati II Karanganyar No 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Ceria Prमितasari pada Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996 – 2000. Dalam melakukan analisis mengenai pembahasan dan pencapaian tujuan penelitian digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, dan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensinya dihitung dengan menggunakan rumus efektifitas dan efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak pada Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996 – 2000 cukup efektif karna tingkat efektifitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari analisis efisiensi cukup efisien karena dasar perhitungan biaya belum semuanya diperhitungkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada tahun anggaran dan objek yang diteliti, disini penelitian dilakukan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 2003 – 2007.

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, terhadap penerimaan pajak perlu diadakan penelitian mengenai usaha untuk meningkatkan penerimaanya apakah efektif dan efisien. Karena selama ini diperkirakan bahwa potensi wajib pajak daerah belum digali secara optimal untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Dari banyaknya sumber pendapatan asli daerah sendiri, penulis mengambil salah satu yaitu pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah tersebut. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul **“EVALUASI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003 – 2007)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengingat pentingnya penerimaan sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan dari sumber lain, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah Tingkat II, sehingga pemungutan Pajak Daerah harus lebih efektif dan efisien. Dengan demikian penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam beberapa periode anggaran sudah efektif ?
2. Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam beberapa periode anggaran sudah efisien ?
3. Bagaimanakah Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan masalah perpajakan ini bertujuan untuk:

1. Menilai efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun anggaran 2003 – 2007.
2. Menilai efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun anggaran 2003 – 2007.
3. Mengetahui pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Karanganyar**

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.

## **2. Bagi Penulis**

Dapat mengetahui arti pentingnya pengetahuan tentang praktek pemungutan pajak baik secara teori maupun secara praktek.

## **3. Bagi Peneliti lainnya**

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penulisan ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Sesuai dengan judul penelitian ini akan dibahas tentang landasan teori, mengenai pengertian pajak daerah sebagai sumber PAD, pengertian efektifitas dan efisiensi, objek dan subjek Pajak Pembangunan I dan Pajak Hotel dan Restoran, serta wilayah pemungutan dan tata cara perhitungan Pajak Hotel dan Restoran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang kerangka teori, data dan sumber data, dan analisa data.



#### **BAB IV : HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah, data dan analisis mengenai efisiensi dan efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

#### **BAB V : PENUTUP**

Sebagai akhir dari penelitian diambil kesimpulan yang didasarkan pada analisis penelitian.